

Disusun oleh:

Sekretariat Kementerian PANRB



KATA PENGANTAR

Naskah sambutan, *keynote speech*, dan orasi ilmiah Menteri PANRB bukan sekedar lembaran-lembaran naskah yang bersifat administratif. Naskah-naskah tersebut merupakan wujud "kebijakan yang berbicara", yang disampaikan secara langsung oleh Menteri PANRB selaku pimpinan organisasi.

Tidak hanya sebagai media penyampaian kebijakan, materi yang disampaikan oleh Menteri PANRB juga digunakan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam hal informasi capaian kinerja dan inovasi yang telah dilakukan Kementerian PANRB. Oleh karena itu, sebagai pejabat yang berwenang di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, kehadiran Menteri PANRB dan materi yang disampaikannya menjadi hal yang ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian banyak pihak.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Sekretariat Kementerian PANRB menyusun buku yang berjudul "SAMBUTAN MENTERI PANRB JULI-AGUSTUS 2018", yang merupakan kompilasi naskah sambutan, *keynote speech*, dan orasi ilmiah Menteri PANRB periode bulan Juli hingga Agustus 2018 ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan oleh Menteri PANRB dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, tidak hanya para peserta yang menghadiri acara pada saat Menteri PANRB menyampaikan materinya.

Kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak.

Jakarta, Oktober 2018

Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Sambutan Menteri PANRB

JULI 2018

1.	Sambutan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Semester I	
	Kementerian Hukum dan Ham	2
2.	Sambutan pada Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I	
	Angkatan XXXVIII dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan III	
	Lembaga Administrasi Negara	7
3.	Sambutan pada Acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon	
	II), Pejabat Administrator (Eselon III), Dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di	
	Lingkungan Kementerian PANRB	13
4.	Sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Badan	
	Kepegawaian Negara	18
5.	Remarks Minister of Adminstrative and Bureaucratic Reform	23
6.	Sambutan pada Acara Seminar Ilmiah Farmasi Universitas Andalas 2018	
	dengan Tema: Peran Profesi Apoteker dalam Pembangunan Nasional	24
7.	Sambutan pada Acara Pencanangan #GerakanSadarLapor secara Serentak	
	di Jakarta, Pelembang, Banjarmasin, Bandung, Makassar, dan Cirebon	30
8.	Sambutan pada Acara Rapat Teknis Persiapan Evaluasi Zona Integritas pada	
	Kepolisian Negara Republik Indonesia	34
9.	Sambutan pada Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama di	
	Bidang Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Perpustakaan .	37



AGUSTUS 2018

10.	Sambutan pada Acara Pembangunan Unit Kerja Percontonan Nasional Zona	
	Integritas dan Penandatanganan MoU tentang Integrasi dan Percepatan	
	Penanganan Perkara oleh Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polres, dan	
	Lapas Situbondo	44
11.	Sambutan pada Acara Workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju	
	WBK/WBBM di Lingkungan BPK RI	48
12.	Pointers Sambutan pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73	
	Kemerdekaan Republik Indonesia	52
13.	Pointers Sambutan pada Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara	
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
	(Kemen PANRB) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	57
14.	Pointers Sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	
	Birokrasi pada Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Kurban Hari Raya Idul	
	Adha 1439 H	61
15	Pointers Sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	•
10.	, , , , ,	
	Birokrasi dalam Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan CPNS	0.4
	Tahun 2018	64

JULI 2018

SAMBUTAN PADA RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN CAPAIAN SEMESTER I KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA, 2 JULI 2018

Yang saya hormati:

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Para Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus Menteri, Penasihat Menteri, Pimpinan Tinggi, dan Kepala Kantor Wilayah; serta
- Hadirin semua yang berbahagia.

Bismillaahirrohamaanirrohiim

Assalaamua'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat taufiq dan hidayah-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi pada acara **Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Semester I Kementerian Hukum dan HAM**.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja selama Semester I Tahun 2018. Hal ini tentu sangat baik, karena evaluasi kinerja mutlak dilakukan agar organisasi tempat kita bekerja senantiasa berada di jalur yang tepat menuju target yang telah ditentukan.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan sebelumnya, tepatnya Desember 2017 yang lalu dalam acara Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum dan HAM, saya mencatat beberapa poin capaian penting Kementerian Hukum dan HAM, antara lain:

- Kementerian Hukum dan HAM adalah Kementerian yang paling aktif melakukan koordinasi dalam kaitan dengan penataan SDM ASN. Hasil dari koordinasi ini antara lain: sistem rekrutmen CPNS di Kementerian Hukum dan HAM dapat dilakukan dengan baik;
- Aktif melakukan upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangannya; dan
- Instansi pelopor untuk melakukan pengintegrasian data kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM dengan data kepegawaian nasional yang dikelola oleh BKN.

Saya berpandangan bahwa di tahun 2018 ini, Kementerian Hukum dan HAM akan mencapai target yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang pernah diungkapkan Ilmuan Albert Einstein, bahwa hidup itu seperti mengendarai sepeda, agar tetap seimbang, kita harus terus bergerak. Oleh sebab itu, Instansi

Pemerintah harus senantiasa meningkatkan kapasitasnya agar tercapai visi dengan efektif dan efisien.

Hadirin yang saya hormati,

Berbicara mengenai peningkatan kapasitas, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rencana Manajemen PNS yang akan menyasar Visi Pemerintahan Berkelas Dunia pada tahun 2024.

Saat ini, Indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan yang cepat di era Industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. Untuk itu, perlu disiapkan SDM aparatur yang berintegritas dan profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa nasionalisme, *hospitality* dan *entrepreneurship*, serta kemampuan *networking*.

Saat ini jumlah keseluruhan ASN Nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana administrasi sebesar 1,6 juta atau sekitar 38%. Proporsi tenaga administratif yang dominan dapat menjadi beban dalam menghadapi tantangan ke depan. Era Industri 4.0 memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga rekrutmen ASN mulai tahun 2017 dan ke depan difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai dengan *core business* instansi dan arah pembangunan nasional guna membidik berbagai sasaran Nawacita, serta meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional.

Fokus perbaikan manajemen ASN untuk menyongsong era Industri 4.0 meliputi:

1. Perencanaan ASN

Perencanaan ASN seluruh K/L/Pemda, harus didasarkan pada arah pembangunan nasional dan potensi daerah dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

2. Rekrutmen dan Seleksi

Rekrutmen dan Seleksi CPNS menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan hasil *Real-Time*, serta seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi. Rekrutmen tahun 2018 ini akan lebih bervariasi dari tahun sebelumnya. Pemerintah akan membuka formasi untuk anak bangsa yang berkarir di luar negeri yang kita kenal dengan Diaspora. Diaspora ini diharapkan mampu mendiseminasi kompetensinya sehingga dapat mengakselerasi kinerja pemerintahan. Selain itu, akan dibuka formasi bagi para atlet atau olahragawan yang berprestasi pada skala internasional. Ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi para atlet;

3. Pengembangan Kompetensi

Melaksanakan kebijakan diklat 20 jam pelajaran per tahun untuk masing-masing ASN dan perbaikan metode pengembangan kompetensi. Untuk meningkatkan kapasitas ASN, kami bersama Lembaga Administrasi Negara terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem Pendidikan dan Pelatihan (diklat). Saat ini kami

sedang melakukan proses transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis *Human Capital Management* dengan mengembangkan ASN *Corporate University*. Pembelajaran ini merupakan upaya terobosan untuk memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran yang bertujuan meningkatkan porsi pengalaman di lapangan terhadap pembelajaran di kelas. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai metoda pelatihan, seperti: *e-learning*, *coaching*, *mentoring* dan *on the job training* (OJT). Sistem ini, akan lebih kontekstual dan memacu peningkatan profesionalisme ASN;

4. Penilaian Kinerja dan Penghargaan

Penilaian kinerja dilakukan 360 derajat sebagai dasar pemberian remunerasi dan penghargaan;

5. Promosi, Rotasi, dan Karir

Didesain berbasiskan sistem merit dengan memperhatikan kebutuhan nasional berdasarkan *talent pool*;

6. Purnabakti

Perbaikan sistem pensiun dengan rasio manfaat yang layak, didanai secara penuh (Fully Funded) oleh lembaga pengelola pensiun, serta iuran bersama antara ASN dan pemerintah. Bapak Presiden telah memberikan amanat bahwa pengelolaan dana pensiun dapat membawa kesejahteraan bagi ASN dan pensiunan, sebagai contoh penyediaan hunian yang layak.

Hadirin yang saya hormati,

Saya sangat terkesan dengan Gerakan "Kami PASTI" yang digalakkan di internal Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2015. Gerakan ini merupakan bentuk reformasi birokrasi dalam mengubah budaya kerja ASN yang sering dicap selalu berada pada *comfort zone* atau zona nyaman. "PASTI" yang merupakan kepanjangan dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif sejalan dengan cita-cita SMART ASN yang telah saya jelaskan. Agar dipandang sebagai profesional dan senantiasa bekerja secara akuntabel, ASN harus memiliki bekal integritas dan jiwa nasionalisme.

Era disruptif yang melanda dunia saat ini menuntut kemampuan wawasan global dan pemahaman terhadap teknologi dan bahasa asing bagi setiap ASN, sehingga hal ini bukan lagi merupakan nilai tambah, melainkan sesuatu yang wajib dimiliki. Selain itu, koordinasi antar instansi serta kerjasama dengan negara lain membutuhkan *networking* (jaringan) yang luas, sehingga tercipta sinergi yang baik. ASN merupakan pilar birokrasi juga dituntut selalu berinovasi. Terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif diharapkan diperlukan dalam mengelola berbagai kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, tidak salah bila kita mengadaptasi jiwa *entrepreneurship* dalam keseharian pekerjaan, sehingga ASN selalu berupaya berinovasi agar kebijakan yang dikeluarkan selalu efektif dan efisien.

Hadirin yang saya hormati,

Saya ikut berbangga dengan hasil-hasil yang sudah dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pencapaian ini bukan merupakan upaya kerja keras yang menguras waktu dan tenaga serta biaya, tetapi kita merasa puas jika hasilnya memberikan makna bagi penyelesaian tugas negara. Tantangan yang paling berat dihadapi di masa mendatang oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah dalam kaitan layanan publik, administrasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Upaya pembenahan birokrasi terus kita lakukan secara bertahap. Satu persatu permasalahan birokrasi kita coba selesaikan. Tantangan dan kendala dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tentu selalu muncul dalam upaya pembenahan tersebut. Namun demikian, dengan kerja keras, dukungan, dan komitmen yang kuat dari pimpinan negara dan berbagai *stakeholder*, kita yakin semua tantangan dan kendala akan kita lalui dengan baik. Kemajuan sebuah instansi pemerintah dalam menghasilkan kinerja sangat tergantung dari peran kepemimpinannya masing-masing. Semoga dengan Rapat Koordinasi ini memberikan semangat dan inspirasi bagi peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM sehingga target Tahun 2018 dapat tercapai.

Wabillaahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI





SAMBUTAN PADA PELEPASAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I ANGKATAN XXXVIII DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA, 5 JULI 2018

Yang terhormat:

- Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Para Pejabat Pimpinan Madya dan Pratama;
- Para Widyaiswara;
- Para Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I dan II; serta
- Hadirin semua yang berbahagia.

Bismillahirrohamanirrohim

Assalaamua'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat hadir pada acara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVIII (Tiga Puluh Delapan) dan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan III, di Lembaga Administrasi Negara.

Pada pagi ini saya merasakan ada kebahagiaan diantara para peserta semua setelah mengikuti pelatihan kepemimpinan yang cukup melelahkan dan menguras tenaga. Berbagai materi diklat yang telah diberikan di dalam kelas, *study* lapangan, dan penyusunan berbagai makalah diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan dan pengalaman Saudara sekalian.

Pada akhir pelatihan, Saudara diminta untuk membuat proyek perubahan sebagai bentuk kontribusi yang harus diberikan kepada instansi dari hasil pendidikan dan pelatihan ini. Dalam jangka menengah dan panjang, proyek-proyek perubahan yang Saudara laksanakan dapat memberikan *outcome* bagi perubahan dan kemajuan birokrasi di bidang tugas masing-masing.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, ASN memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu pendekatan yang kita lakukan sekarang adalah pendekatan **Human Capital**. Ini berarti bahwa Saudara sekalian

sebagai ASN merupakan aset yang sangat berharga bagi pemerintah. Pemerintah akan merasa sangat merugi jika kehilangan Saudara sekalian.

Saat ini memang kita sedang berbenah. Sebagai aset yang penting, masih banyak ASN yang justru membebani pemerintah. Faktanya di setiap instansi pemerintah, dipastikan tidak semua ASN memiliki kapasitas dan kualitas yang baik untuk menjalankan tugas dan fungsi unit kerja. ASN yang seperti ini, jika dibiarkan terus akan menggerus dan merusak kinerja organisasi.

Dengan pendekatan **human capital**, mau tidak mau nantinya setiap ASN dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas kepada unit kerja dan organisasi secara keseluruhan. Karena itu, pemerintah terus berupaya agar asetnya memiliki kapasitas dan kualitas yang baik dalam menjalankan birokrasi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan, termasuk pelatihan kepemimpinan. Biaya yang dikeluarkan pemerintah merupakan investasi yang cukup besar. Karena itu, wajar jika pemerintah menuntut agar nantinya Saudara setelah selesai mengikut pelatihan ini harus mampu menunjukan kinerja yang lebih baik lagi.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dalam tata kepemerintahan kita, ASN memiliki peran yang cukup strategis, yaitu:

- 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di lain pihak, tantangan birokrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan semakin hari semakin kompleks. Karena itu, Saudara tidak dapat hanya menjalankan rutinitas pemerintahan yang itu-itu saja (business as usual). Harus ada perubahan-perubahan dan senantiasa selalu berupaya untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik dari hari ke hari. Birokrasi harus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi begitu cepat.

Kita harus lebih pandai dari pelaku bisnis, agar kita tidak terperangkap ke dalam jerat strategi bisnis yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kita harus terus mengelola kepentingan berbagai pihak agar berujung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus hadir dalam segala segi kehidupan masyarakat. Saudara-saudara sebagai pemimpin pada unit kerja di lingkungan masing-masing harus menjadi motor penggerak perubahan bagi organisasi. Tanpa kehadiran ASN yang profesional, birokrasi tidak akan mampu menjalankan perannya dengan baik.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada saat ini, kita sedang berupaya untuk membangun Indonesia yang melayani, yaitu Indonesia yang pemerintahnya, masyarakatnya, dan para pelaku usahanya secara bersama-sama melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan Indonesia yang ramah investasi, ramah pariwisata, ramah lingkungan, dan sangat kompetitif dalam melayani, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia dapat berkesinambungan.

Untuk menjadikan Indonesia yang melayani tersebut, diperlukan berbagai perubahan cara pandang dan perilaku, yang intinya adalah perubahan mentalitas para pejabat dan pegawai pemerintahan, para pelaku usaha, dan masyarakat. Mentalitas melayani inilah yang diharapkan dapat menjadi unggulan dan pembeda Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia harus bergerak ke arah sana, sehingga kita dapat memenangkan persaingan global di berbagai bidang.

Perubahan cara pandang dan perilaku ASN ini akan benar-benar menjadi tumpuan keberhasilan sektor-sektor lainnya. Jika ASN berubah, maka perubahan ini akan mendorong kemajuan pada bidang-bidang pembangunan lainnya. Perubahan-perubahan itu kita lakukan melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dipandang sebagai faktor pengungkit penting dalam pembangunan suatu bangsa, bahkan bagi negara-negara yang telah maju sekalipun, reformasi birokrasi merupakan proses yang tidak berhenti dan dilakukan secara berkesinambungan.

Hal ini disebabkan oleh tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi dan peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Salah satu aspek yang sedang kita perbaiki saat ini adalah terkait dengan ASN. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang perubahan dimaksud, antara lain:

Pertama, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem pengadaan pegawai. Tahun 2017 kita telah berhasil menjalankan proses pengadaan pegawai dengan baik, transparan, bersih dan bebas KKN. Proses ini berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen CPNS. Tawaran-tawaran *hoax* yang menjanjikan seseorang dapat diterima menjadi CPNS dengan membayar sejumlah uang, telah berhasil kita tangkal dengan penerapan sistem seleksi berbasis komputer atau *Computer Assisted Test* (CAT).

Kedua, pemerintah juga berupaya untuk menyempurnakan sistem pelatihan ASN. Fokus pembangunan di masa mendatang adalah pada peningkatan SDM. Karena itu, pemerintah juga sedang mengupayakan perbaikan sistem pelatihan ASN. Kita sedang berupaya membentuk ASN *Corporate University*, yang akan menaungi setiap program pengembangan ASN yang berbasis kebutuhan nyata dalam bidang pekerjaaan.

Ketiga, pemerintah juga sedang berupaya untuk memperbaiki sistem penggajian. Sehingga nantinya gaji ASN tidak kalah bersaing dengan mereka yang bekerja di sektor swasta. Namun demikian, setiap ASN nantinya akan dituntut untuk berkinerja lebih tinggi. Kontribusi masing-masing individu ASN harus jelas dan terukur.

Keempat, saat ini pemerintah sedang berupaya memperbaiki sistem pensiun. Sudah berpuluh tahun kita menggunakan sistem pensiun yang disatu pihak membebani APBN, dan di lain pihak para pensiunan pun tidak memperoleh manfaat yang memadai di masa pensiun mereka. Nantinya, baik pemerintah maupun pegawai akan memberikan kontribusi iuran, masuk ke dalam rekening/account pribadi masing-masing pegawai, hasil iuran akan dikelola oleh pengelola dana pensiun yang dibentuk oleh pemerintah, dana pensiuan akan diinvestasikan dalam berbagai bentuk usaha yang dapat memberikan kemanfaatan bagi ASN.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Pada tahun ini, kita akan melakukan pengadaan lagi dengan cakupan yang lebih masif tidak hanya di pusat, tetapi juga di pemerintah daerah. Tentunya berbagai kelemahan yang kita temukan, kita perbaiki tahun ini. Berbagai instansi kita libatkan, termasuk juga pihak BUMN seperti PT Telkom, Bank Mandiri dan Bank BRI, sebagai unsur yang mungkin dapat memberikan masukan bagi perbaikan proses pelaksanaan pengadaan.

Itulah sebagian hal yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas ASN. Masih banyak lagi hal lain yang kita lakukan, karena ternyata permasalahan birokrasi tidak hanya terkait dengan SDM-nya saja.

Saudara-Saudara yang saya hormati,

Sekembalinya Saudara ke instansi masing-masing, saya berharap agar ide-ide atau pemikiran yang didapatkan dari pelatihan kepemimpinan serta proyek perubahan yang saudara gulirkan dapat diimplementasikan dan dikembangkan guna mendukung pergerakan reformasi di instansi Saudara masing-masing.

Saya juga mengingatkan agar terus dibangun kebersamaan dan jaringan yang sudah terjalin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi di bidang manajemen kepemerintahan dan pembangunan. Semangat untuk terus berinovasi juga harus terus digelorakan dan dibangun pada unit-unit kerja yang Saudara pimpin.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada Saudara-saudara yang telah mengikuti dan melalui Pelatihan Kepemimpinan ini, semoga bermanfaat bagi organisasi dan pengembangan individu Saudara masing-masing. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi usaha kita bersama dalam memajukan negeri yang kita banggakan ini.

Wabillaahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,





SAMBUTAN PADA ACARA PELANTIKAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II), PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III), DAN PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PANRB JAKARTA, 6 JULI 2018

Yang saya hormati:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri atau yang mewakili;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang mewakili;
- Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian PANRB;
- · Kepala Biro Kepegawaian Kementerian PUPR;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian PANRB;
- Para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kementerian PANRB; serta
- Saudara-saudara sekalian yang berbahagia.

Bismillaahirrohamaanirrohiim

Assalaamua'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelantikan yang kita laksanakan hari ini adalah hasil rotasi dan hasil Seleksi Terbuka Tahun 2018 bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta hasil dari Rapat Tim Penilai Kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka mengisi jabatan yang lowong dan melakukan penyegaran kerja bagi pejabat lainnya, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi.

Selain itu, dapat kita ketahui bersama bahwa strategi yang dilakukan dalam pengisian jabatan yang kosong tersebut adalah dengan melakukan rotasi di tataran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama *existing* saat ini terlebih dahulu. Selanjutnya, hasil dari rotasi ini menghasilkan sejumlah jabatan yang belum terisi, dimana pengisiannya telah dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang telah dilaksanakan mulai awal tahun 2018 ini.

Hadirin yang berbahagia,

Ketahuilah bahwa promosi dan rotasi yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk terus meningkatkan kinerja organisasi kementerian yang sama-sama kita cintai ini. Adanya sejumlah posisi yang lowong saat ini di Kementerian PANRB, idealnya memang harus dapat segera diisi oleh generasi-generasi baru yang telah teruji dan diharapkan dapat menjadi "energi" organisasi dalam menjawab tantangan-tantangan pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Diharapkan, Kementerian PANRB dapat terus menjaga kesinambungan proses regenerasi ini secara baik dan konsisten.

Promosi yang kita laksanakan saat ini merupakan kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada Saudara untuk dapat mengemban tugas dan tanggung jawab baru dengan sebaiknya-baiknya. Oleh karenanya, Saudara dituntut untuk dapat segera memberikan unjuk kerja yang optimal. Adapun proses rotasi yang juga kita laksanakan saat ini adalah bagian dari implementasi Sistem Merit "the right man on the right place" sesuai dengan hasil evaluasi kinerja Saudara masing-masing. Yakinlah bahwa proses rotasi yang saat ini Saudara tempuh adalah bagian dari sebuah proses pengembangan kompetensi dalam bentuk "tour of duty" agar dapat memperkaya pengalaman serta kemampuan Saudara dalam mengemban tugas jabatan baru yang tentu saja akan sangat berguna untuk bekal karir Saudara di masa yang akan datang.

Hadirin yang saya banggakan,

Terdapat sejumlah hal yang telah kita kerjakan dengan baik dalam upaya mewujudkan sasaran strategis Kementerian PANRB dan sasaran reformasi birokrasi. Salah satu diantaranya, yaitu bahwa setiap tingkatan unit kerja memiliki indikator kinerja yang tepat. Selain itu, kita telah berhasil mengintegrasikan berbagai kegiatan dan target-target kerja sesuai bidang tugas masing-masing, sehingga terwujud sinergi dari berbagai kegiatan yang ada. Target-target yang selama ini terpencar-pencar, berhasil kita satukan dan diharapkan memberikan *outcome* yang lebih berarti. Tentu saja hal ini dapat tercapai dengan cara melakukan kerja sama secara internal dengan unit kerja lain dan dengan mitra kerja lainnya, dengan terus berpegang teguh pada kata kunci: Fokus, Akselerasi, dan Kolaborasi.

Dengan cara seperti ini, pada dasarnya kita melakukan upaya revitalisasi kedudukan masing-masing unit kerja. Melalui diskusi, kita berhasil mengidentifikasi berbagai kelemahan kita, seperti kurang berani melakukan terobosan dan inovasi ataupun penggunaan indikator kinerja yang dirasa belum tepat. Akan tetapi di lain pihak, kita secara simultan akan terus berupaya untuk lebih mengoptimalkan kemampuan kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

Hadirin sekalian,

Selain hal tersebut di atas, masih banyak tugas-tugas yang harus segera diselesaikan, terutama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sasaran reformasi birokrasi mencakup tiga hal, yaitu: (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi

yang efektif dan efisien; dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk menempatkan posisi birokrasi Indonesia pada level *World Class Government*, sehingga kita bisa berada pada posisi yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya dalam persaingan global.

Lebih jauh, masih banyak "pekerjaan rumah" yang sudah mulai kita kerjakan, tetapi harus segera kita selesaikan dengan baik, seperti:

- Pembangunan Zona Integritas dengan cara membangun unit pelayanan yang bebas dari korupsi dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas di setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
- Penerapan Talent Management Nasional;
- Melakukan rotasi/mobilisasi nasional JPT Pratama ASN;
- Penyederhanaan struktur birokrasi dan perbaikan proses bisnis melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Mendorong implementasi Money Follow Program; serta
- Menjaga netralitas ASN sehingga Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, bersih dari KKN, netral, dan bebas dari intervensi politik dapat terwujud.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,,

Dari sejumlah hal yang telah saya utarakan tadi, dapat kita sadari bahwa masih banyak pekerjaan dan target mendasar dalam rangka kelanjutan reformasi birokrasi yang harus kita capai. Oleh karenanya, penempatan Sumber Daya Manusia Aparatur yang tepat sesuai dengan tuntutan pekerjaan serta mampu untuk bekerja cepat, tepat, dan profesional sangat dibutuhkan di Kementerian PANRB. Kami sangat berharap dengan adanya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dapat memenuhi apa yang kita harapkan bersama.

Saya ucapkan selamat datang kepada:

- Saudari Sri Rejeki Nawangsasih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 dan
- Saudara Mudzakir dari Kementerian Luar Negeri.

Selamat bergabung dengan Kementerian PANRB. Semoga kehadiran Saudara dengan dedikasi dan kontribusinya dapat membawa perubahan dan terobosan-terobosan yang signifikan bagi kementerian ini.

Selanjutnya bagi semua Pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya, saya ucapkan selamat dengan harapan agar Saudara dapat memberikan dan mendedikasikan seluruh kemampuan Saudara di tempat yang baru untuk dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan, serta meridhoi usaha kita bersama. Aamiin. Terima kasih dan selamat bekerja.

Wabillaahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,





SAMBUTAN PADA

RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TANGERANG, 11 JULI 2018

Yang terhormat:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; serta
- Hadirin Peserta Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2018 yang berbahagia.

Bismillahirrohamanirrohim

Assalaamua'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat taufiq dan hidayah-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi pada acara **Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun** 2018.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep dan implementasi *Human Capital Management* di era industri 4.0, membangun komitmen nasional untuk mendukung implementasi *Human Capital Management*, dan menyusun strategi implementasi rencana suksesi di setiap instansi pusat dan daerah.

Hadirin yang berbahagia,

Road Map Pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini sudah memasuki RPJMN Ke 3 (tahun 2015-2019). Pada fase ini kita ingin mewujudkan manajemen ASN yang berdasarkan sistem merit, yakni berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Dengan basis sistem merit tersebut, berikutnya kita akan melakukan akselerasi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024 yang merupakan tujuan akhir dari RPJMN Ke 4 (tahun 2020-2024).

Di sisi yang lain, saat ini dunia sedang menghadapi perubahan yang super cepat di era Industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. Berdasarkan riset *McKinsey Global Institute* di tahun 2015, dampak revolusi industri 4.0 ini 3.000 kali lebih dahsyat daripada Revolusi Industri Pertama di abad ke 19. *McKinsey* mengatakan, kecepatan perubahan ini akan 10 kali lebih cepat dan dampaknya akan 300 kali lebih luas.

Era disruptif sebagai konsekuensi dari transformasi era Industri 4.0 ini menuntut kemampuan wawasan global dan pemahaman terhadap teknologi dan bahasa asing bagi setiap ASN. Hal ini bukan lagi merupakan nilai tambah, melainkan sesuatu yang wajib dimiliki. Selain itu, koordinasi antar instansi serta kerjasama dengan negara lain kini dan ke depan membutuhkan *networking* (jaringan) yang luas, sehingga tercipta sinergi yang baik. ASN merupakan pilar birokrasi juga dituntut selalu berinovasi. Terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif sangat diperlukan dalam mengelola berbagai kebijakan pemerintahan. Oleh sebab itu, tidak salah bila ASN mulai mengadaptasi jiwa *entrepreneurship dan hospitality* dalam keseharian pekerjaan, sehingga ASN dapat melahirkan kebijakan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Dalam perspektif demikian, maka kita perlu mengakselerasi terwujudnya SMART ASN menuju *World Class Government*, yakni SDM aparatur yang berintegritas dan profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa nasionalisme, memiliki jiwa *hospitality* dan *entrepreneurship*, serta kemampuan *networking*.

Saat ini jumlah keseluruhan ASN Nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana administrasi sebesar 1,6 juta atau sekitar 38 %. Proporsi tenaga administratif yang dominan dapat menjadi beban dalam menghadapi tantangan ke depan. Era Industri 4.0 memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga rekrutmen ASN mulai tahun 2017 dan ke depan difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai dengan *core business* instansi dan arah pembangunan nasional guna membidik berbagai sasaran Nawacita, serta meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional.

Hadirin yang saya banggakan,

Fokus perbaikan manajemen ASN dalam kerangka kebijakan *Human Capital Management* ASN, untuk menyongsong era Industri 4.0 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan ASN

Perencanaan ASN seluruh K/L/Pemda, harus didasarkan pada arah pembangunan nasional dan potensi daerah dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

2. Rekrutmen dan Seleksi

Rekrutmen dan Seleksi CPNS menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan hasil *Real-Time*, serta seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi.

Dalam rangka mempersiapkan generasi yang lebih baik, usai pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017, para CPNS yang notabene adalah tunas negara dan pemilik masa depan bangsa, diberikan pembekalan melalui kuliah umum dari Bapak Presiden dan para inspirator nasional yang kompeten di bidangnya seperti Menteri Keuangan, CEO Gojek dan Kepala BPIP.

Untuk itu, saya mengharapkan nanti setelah pelaksanaan seleksi CPNS di daerah, para CPNS Provinsi serta Kabupaten/Kota juga diberikan pembekalan yang sama oleh para Gubernur serta Bupati/Walikota untuk memotivasi dan menginspirasi mereka agar menjadi PNS yang tangguh dan profesional.

3. Pengembangan Kompetensi

Melaksanakan kebijakan diklat 20 jam pelajaran per tahun untuk masing-masing ASN dan perbaikan metode pengembangan kompetensi. Untuk meningkatkan kapasitas ASN, kami bersama Lembaga Administrasi Negara terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem Pendidikan dan Pelatihan (diklat). Saat ini kami sedang melakukan proses transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis *Human Capital Management* dengan mengembangkan ASN *Corporate University*. Pembelajaran ini merupakan upaya terobosan untuk memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran yang bertujuan meningkatkan porsi pengalaman di lapangan terhadap pembelajaran di kelas. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai metoda pelatihan, seperti: *e-learning, coaching, mentoring* dan *on the job training* (OJT). Sistem ini, akan lebih kontekstual dan memacu peningkatan profesionalisme ASN;

4. Penilaian Kinerja dan Penghargaan

Penilaian kinerja dilakukan 360 derajat sebagai dasar pemberian remunerasi dan penghargaan;

5. Promosi, Rotasi dan Karir

Didesain berbasiskan sistem merit dengan memperhatikan kebutuhan nasional berdasarkan *talent pool;*

6. Purnabakti

Perbaikan sistem pensiun dengan rasio manfaat yang layak, didanai secara penuh (Fully Funded) oleh lembaga pengelola pensiun, serta iuran bersama antara ASN dan pemerintah. Bapak Presiden telah memberikan amanat bahwa pengelolaan dana pensiun dapat membawa kesejahteraan bagi ASN dan pensiunan, sebagai contoh penyediaan hunian yang layak.

Hadirin sekalian,

Terkait dengan rencana pengadaan CPNS tahun 2018, dapat kami sampaikan bahwa kebijakan penetapan formasinya diutamakan untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan, serta prioritasnya diarahkan untuk membidik bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Rekrutmen tahun 2018 ini juga akan lebih bervariasi dari tahun sebelumnya. Pemerintah akan membuka formasi untuk anak bangsa yang berkarir di luar negeri yang kita kenal dengan Diaspora. Diaspora ini diharapkan mampu mendiseminasikan kompetensinya sehingga dapat mengakselerasi kinerja pemerintahan. Selain itu, akan dibuka formasi bagi para atlet atau olahragawan yang berprestasi pada skala internasional. Ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi para atlet.

Demikian juga untuk formasi yang berasal dari anak-anak kita yang berprestasi (cumlaude), disabilitas serta putra/putri Papua dan Papua Barat, sebagaimana pengadaan tahun sebelumnya, akan kita berikan perhatian.

Hadirin yang saya hormati,

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. Karena itu, implementasi dari kebijakan *Human Capital Management* ASN sebagaimana yang telah dipaparkan akan banyak tergantung pada peran dan kinerja BKN, serta dukungan dari unit kerja lainnya yang membidangi kepegawaian, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk itu, upaya pembenahan birokrasi yang dimulai dari penataan SDM aparaturnya, harus terus kita lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Satu persatu permasalahan yang melingkupinya harus kita selesaikan. Tantangan dan kendala tentu selalu muncul dalam upaya pembenahan tersebut. Namun demikian, dengan kerja keras, dukungan, dan komitmen yang kuat dari pimpinan negara, jajaran ASN serta berbagai *stakeholders*, kita yakin semua tantangan dan kendala dalam pengembangan SDM aparatur dapat kita hadapi dan kita selesaikan dengan baik.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat optimal bagi penguatan manajemen ASN, khususnya dalam rangka membangun komitmen nasional untuk mendukung kebijakan dan implementasi *Human Capital Management* Aparatur Sipil Negara.

Wabillaahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,







REMARKS MINISTER OF ADMINSTRATIVE AND BUREAUCRATIC REFORM BATAM, 13 JULI 2018

First of all allow me to extend my heartfelt welcome to all of you participants of **Batam International Bridge Open Tournament 2018** in Batam, Kepulauan Riau Province. I hope the beauty and natural Batam will give you memorable atmosphere of the game.

To have a reputable and sustanaible sport event like Batam International Bridge Open Tournament 2018 is not an easy task and can not easily achieved. It need good planning and management, synergy, good timing and proper infrastructure. It has been proven in this competition.

I am aware that this annual event is the biggest bridge championship in ASEAN participated many foreign countries. In 2016-2017 participants from 13 countries have join this important competition.

I welcome this event and extend my sincere appreciation for those who have tirelessly make this competition possible and subccessful. I also believe that your serious efforts will not only benefit the progress and popularity of bridge as sport in Indonesia but also for the tourism industry in Batam and Indonesia as a whole.

I am also very proud that this annual competition is included in the World Bridge Calendar Federation (WBF). It is a recognition but at the same time it is a huge responsibility so that this event can be organized every year successfully.

Since Batam is very close to me, I am also very delighted that Batam will be more exposed for international event so that it can encourage the people and local government to prepare themselves as good host.

I wish for the success of the Batam International Bridge Open Tournament 2018.

Thank You.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

SAMBUTAN PADA ACARA SEMINAR ILMIAH FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS 2018 DENGAN TEMA: PERAN PROFESI APOTEKER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

DEPOK, 14 JULI 2018

Yang saya hormati:

- Ketua Ikatan Alumni Farmasi Unversitas Andalas;
- Para Alumni Farmasi Universitas Andalas:
- Hadirin semua.

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita semua dapat hadir pada acara **Seminar Ilmiah Farmasi Universitas Andalas 2018.**

Seminar ini memiliki arti yang sangat penting bagi para alumni Farmasi Universitas Andalas. Seminar ini akan menjadi saran untuk seluruh alumni Farmasi Universitas Andalas untuk bersilaturahmi, menjalin komunikasi, membangun kekeluargaan, bertukar pengalaman, dan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi profesi semua Alumni. Karena itu, saya berharap seminar ini dapat memperkuat jejaring kerja diantara semua alumni. Pada seminar ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan topik mengenai "Peran Profesi Apoteker dalam Pembangunan Nasional".

Hadirin yang saya hormati,

Road Map Pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini sudah memasuki RPJMN Ke 3 (tahun 2015-2019). Pada fase ini kita ingin mewujudkan manajemen ASN yang berdasarkan sistem merit, yakni berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Dengan basis sistem merit tersebut, berikutnya kita akan melakukan akselerasi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024 yang merupakan tujuan akhir dari RPJMN Ke 4 (tahun 2020-2024).

Di sisi yang lain, saat ini dunia sedang menghadapi perubahan yang super cepat di era Industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. Berdasarkan riset *McKinsey Global Institute* di tahun 2015, dampak revolusi industri 4.0 ini 3.000 kali lebih dahsyat daripada Revolusi Industri Pertama di abad ke 19. *McKinsey* mengatakan,

kecepatan perubahan ini akan 10 kali lebih cepat dan dampaknya akan 300 kali lebih luas.

Era disruptif sebagai konsekuensi dari transformasi era Industri 4.0 ini menuntut kemampuan wawasan global dan pemahaman terhadap teknologi dan bahasa asing bagi setiap ASN. Hal ini bukan lagi merupakan nilai tambah, melainkan sesuatu yang wajib dimiliki. Selain itu, koordinasi antar instansi serta kerjasama dengan negara lain kini dan ke depan membutuhkan *networking* (jaringan) yang luas, sehingga tercipta sinergi yang baik. ASN merupakan pilar birokrasi juga dituntut selalu berinovasi. Terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif sangat diperlukan dalam mengelola berbagai kebijakan pemerintahan. Oleh sebab itu, tidak salah bila ASN mulai mengadaptasi jiwa *entrepreneurship dan hospitality* dalam keseharian pekerjaan, sehingga ASN dapat melahirkan kebijakan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Dalam perspektif demikian, maka kita perlu mengakselerasi terwujudnya SMART ASN menuju *World Class Government*, yakni SDM aparatur yang berintegritas dan profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa nasionalisme, memiliki jiwa *hospitality* dan *entrepreneurship*, serta kemampuan *networking*.

Saat ini jumlah keseluruhan ASN Nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana administrasi sebesar 1,6 juta atau sekitar 38 %. Proporsi tenaga administratif yang dominan dapat menjadi beban dalam menghadapi tantangan ke depan. Era Industri 4.0 memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga rekrutmen ASN mulai tahun 2017 dan ke depan difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai dengan *core business* instansi dan arah pembangunan nasional guna membidik berbagai sasaran Nawacita, serta meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional.

Hadirin yang saya banggakan,

Fokus perbaikan manajemen ASN dalam kerangka kebijakan *Human Capital Management* ASN, untuk menyongsong era Industri 4.0 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan ASN

Perencanaan ASN seluruh K/L/Pemda, harus didasarkan pada arah pembangunan nasional dan potensi daerah dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

2. Rekrutmen dan Seleksi

Rekrutmen dan Seleksi CPNS menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan hasil *Real-Time*, serta seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi.

Dalam rangka mempersiapkan generasi yang lebih baik, usai pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017, para CPNS yang notabene adalah tunas negara dan pemilik masa depan bangsa, diberikan pembekalan melalui kuliah umum dari Bapak

Presiden dan para inspirator nasional yang kompeten di bidangnya seperti Menteri Keuangan, CEO Gojek dan Kepala BPIP.

Untuk itu, saya mengharapkan nanti setelah pelaksanaan seleksi CPNS di daerah, para CPNS Provinsi serta Kabupaten/Kota juga diberikan pembekalan yang sama oleh para Gubernur serta Bupati/Walikota untuk memotivasi dan menginspirasi mereka agar menjadi PNS yang tangguh dan profesional.

3. Pengembangan Kompetensi

Melaksanakan kebijakan diklat 20 jam pelajaran per tahun untuk masing-masing ASN dan perbaikan metode pengembangan kompetensi. Untuk meningkatkan kapasitas ASN, kami bersama Lembaga Administrasi Negara terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem Pendidikan dan Pelatihan (diklat). Saat ini kami sedang melakukan proses transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis *Human Capital Management* dengan mengembangkan ASN *Corporate University*. Pembelajaran ini merupakan upaya terobosan untuk memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran yang bertujuan meningkatkan porsi pengalaman di lapangan terhadap pembelajaran di kelas. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai metoda pelatihan, seperti: *e-learning, coaching, mentoring* dan *on the job training* (OJT). Sistem ini, akan lebih kontekstual dan memacu peningkatan profesionalisme ASN;

4. Penilaian Kinerja dan Penghargaan

Penilaian kinerja dilakukan 360 derajat sebagai dasar pemberian remunerasi dan penghargaan;

5. Promosi, Rotasi dan Karir

Didesain berbasiskan sistem merit dengan memperhatikan kebutuhan nasional berdasarkan *talent pool;*

6. Purnabakti

Perbaikan sistem pensiun dengan rasio manfaat yang layak, didanai secara penuh (Fully Funded) oleh lembaga pengelola pensiun, serta iuran bersama antara ASN dan pemerintah. Bapak Presiden telah memberikan amanat bahwa pengelolaan dana pensiun dapat membawa kesejahteraan bagi ASN dan pensiunan, sebagai contoh penyediaan hunian yang layak.

Hadirin sekalian,

Terkait dengan rencana pengadaan CPNS tahun 2018, dapat kami sampaikan bahwa kebijakan penetapan formasinya diutamakan untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan, serta prioritasnya diarahkan untuk membidik bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Rekrutmen tahun 2018 ini juga akan lebih bervariasi dari tahun sebelumnya. Pemerintah akan membuka formasi untuk anak bangsa yang berkarir di luar negeri yang kita kenal dengan Diaspora. Diaspora ini diharapkan mampu mendiseminasikan kompetensinya sehingga dapat mengakselerasi kinerja pemerintahan. Selain itu, akan

dibuka formasi bagi para atlet atau olahragawan yang berprestasi pada skala internasional. Ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi para atlet.

Demikian juga untuk formasi yang berasal dari anak-anak kita yang berprestasi (cumlaude), disabilitas serta putra/putri Papua dan Papua Barat, sebagaimana pengadaan tahun sebelumnya, akan kita berikan perhatian.

Hadirin yang saya hormati,

Salah satu prioritas pembangunan Indonesia difokuskan pada upaya membangun kesehatan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan kesehatan, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini selalu memberikan perhatian yang tinggi pada upaya meningkatkan kapasitas maupun kualitas tenaga kesehatan. Pada tahun 2017, kita telah mengangkat 39.090 pegawai tidak tetap bidang kesehatan, yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, kita juga akan mengangkat banyak tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Pembangunan bidang kesehatan juga memerlukan tenaga apoteker. Tanpa didukung tenaga apoteker, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, terdapat dua pekerjaan utama yang harus dilakukan dalam kefarmasian, yaitu fasilitas distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Kedua hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh profesi apoteker.

Namun demikian, peran penting ini perlu dilengkapi dengan berbagai perangkat lain yang diperlukan oleh setiap apoteker dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya, apoteker harus didukung dengan *standard operating procedures* (SOPs) yang jelas, tertulis, ditetapkan secara resmi, diperbarui sesuai dengan perkembangan, serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara individu setiap penyandang profesi apoteker harus memiliki kemampuan untuk:

- Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Setiap apoteker harus memiliki jiwa hospitality, terlebih lagi yang dilayani adalah para pasien yang memerlukan bantuan kita;
- Harus memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa obat-obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan resep dokter adalah obat-obat yang legal dan bukan produk palsu;
- Harus memiliki integritas yang kuat, agar tidak melanggar kode etik dan kode perilaku apoteker;
- Memberikan informasi yang tepat, jelas dan tidak bias terkait keamanan kesediaan farmasi dan alat kesehatan yang digunakan pasien;
- Melakukan pengelolaan obat yang baik.

Hadirin yang saya hormati,

Setiap penyandang profesi apoteker harus selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi tidak hanya terkait dengan masalah kefarmasian tetapi juga menyangkut kemampuan manajemennya. Dalam bidang kefarmasian, setiap apoteker harus terus menerus meningkatkan kompetensi profesionalitasnya, memperbarui pengetahuan kefarmasiannya sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kefarmasian atau yang mendukungnya.

Dalam bidang manajemen, setiap apoteker juga harus memiliki kemampuan untuk membangun jejaring dengan profesi lainnya, seperti dokter, perawat, produsen obat, bahkan dengan masyarakat sekalipun. Apoteker juga harus memiliki jiwa inovatif, kreatif, bahkan juga jiwa kewirausahaan yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada Saudara-saudara semua. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi usaha kita bersama dalam memajukan negeri yang kita banggakan ini.

Wabillaahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,





SAMBUTAN PADA ACARA PENCANANGAN #GERAKANSADARLAPOR SECARA SERENTAK DI JAKARTA, PELEMBANG, BANJARMASIN, BANDUNG, MAKASSAR, DAN CIREBON JAKARTA, 15 JULI 2018

Yang saya hormati:

- Kepala Kantor Staf Presiden;
- Komisioner Ombudsman RI;
- Sekretaris Kementerian, Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus Kementerian PANRB;
- Para Pimpinan Lembaga Mitra Pembangunan dari USAID dan GIZ;
- Para Pimpinan Lembaga Penggiat Masyarakat;
- Hadirin sekalian yang berbahagia.

Bismillahirrohamanirrohim

Assalaamua'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, kasih, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama dengan Komisioner Ombudsman RI, Kepala Kantor Staf Presiden, dan beberapa pejabat terkait dalam acara **Pencanangan #GerakanSadarLapor**.

Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana tadi dilaporkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk melakukan promosi, edukasi, dan penyebaran informasi mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dengan menggunakan *platform* nasional, aplikasi LAPOR! yang berasal dari singkatan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

Saya menyambut baik kegiatan ini, karena mempunyai arti strategis dalam perkembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Arti strategis ini yaitu kita mengawali tekad yang cukup berani mengkampanyekan secara luas mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Hal ini berarti para pengelola dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah siap untuk mengelola pengaduan ini dengan baik.

Saya kira kegiatan ini cukup menarik dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Car Free Day (CFD) dimana masyarakat luas dapat menyaksikan

kegiatan ini dengan berbagai atraksi dan pertunjukan yang menarik. Apalagi dilaksanakan secara serempak dan pada waktu yang sama di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Palembang, Bandung, Cirebon, Banjarmasin, dan Makassar. Dengan pelaksanaan secara serempak di beberapa kota besar di Indonesia, diharapkan gaung kegiatan ini cukup besar, sehingga mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hadirin yang saya hormati,

Pengaduan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa penyediaan unit pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik dan termasuk standar pelayanan publik.

Sebaliknya bagi masyarakat, ketersediaan ruang untuk dapat mengadukan pelayanan publik merupakan hak. Oleh karena itu tidak ada kecuali lain, pengaduan pelayanan publik itu sesuatu yang mutlak dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kehadiran Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik yang menggunakan *Platform* Nasional Aplikasi LAPOR! diharapkan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, termasuk berbagai kanal telah disediakan untuk memudahkan pengaduan seperti SMS 1708.

Dengan kegiatan promosi, edukasi, dan penyebaran informasi, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi dalam menyampaikan pengaduan pelayanan publik. Peningkatan partisipasi ini diharapkan menjadi masukan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi informasi pelayanan publik, Kementerian PANRB juga telah membangun Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). Perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi SIPP merupakan aplikasi bersama yang dapat digunakan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam menyediakan informasi pelayanan publik sebagai dasar peta pelayanan publik nasional. Masyarakat dapat mengakses situs website SIPP ini melalui *sipp.menpan.go.id.*

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua KSP, Pimpinan Ombudsman RI, dan jajarannya di daerah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran pemerintahan, lembaga penggiat masyarakat, dan masyarakat umum yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kegiatan kita ini.

Wabillaahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.







SAMBUTAN PADA ACARA RAPAT TEKNIS PERSIAPAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 25 JULI 2018

Yang Terhormat:

- Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB;
- Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB;
- Asisten Bidang Perencanaan dan Anggaran POLRI;
- Wakil Inspektur Pengawasan Umum POLRI;
- Para Dirreskrimsus, Dirlantas, Kapolresta, dan Kapolres; serta
- Saudara-saudara hadirin undangan yang berbahagia.

Assalamualaikum. Wr. Wb. Salam Sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat sehat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada pertemuan hari ini, dalam acara "Rapat Teknis Persiapan Evaluasi Zona Integritas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Reformasi Birokrasi merupakan langkah terpenting untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan melayani. Nantinya, birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani tersebut akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, profesional, dan bersih dari praktik KKN. Birokrasi dengan ciri ini juga akan membawa banyak percepatan bagi pembangunan Indonesia ke depan.

Mewujudkan kondisi tersebut bukan hal yang mudah, namun juga bukan suatu hal yang mustahil. Setiap instansi pemerintah perlu membangun komitmen bersama dan melakukan perubahan secara terstruktur, mulai dari membangun budaya kinerja, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan profesionalisme SDM, serta melakukan pengawasan secara efektif.

Dalam beberapa tahun ini, POLRI telah melakukan banyak perubahan besar dalam birokrasinya. Hal ini terlihat dari indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja yang terus meningkat. Perkembangan nilai ini menunjukkan bahwa birokrasi di POLRI semakin efektif, efisien, dan berintegritas. Hasil survey reformasi birokrasi terhadap masyarakat juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan integritas POLRI semakin membaik dari tahun ke tahun, dan semakin diakui oleh masyarakat. Hal ini juga ditunjukkan oleh semakin banyaknya Polres percontohan di seluruh Indonesia yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Tahun 2018 ini, saya merasakan komitmen yang sangat kuat dari pimpinan instansi pemerintah dan seluruh jajaran birokrasi, khususnya di lingkungan POLRI untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih dari KKN, dan mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan percontohan yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), dari POLRI sebanyak 134 unit kerja pelayanan yang diajukan.

Membangun unit kerja pelayanan berpredikat WBK/WBBM tentunya tidak mudah, karena pimpinan instansi, pimpinan unit kerja pelayanan, beserta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan bekelanjutan. Perbaikan dilakukan terhadap sistem dan tata kelola yang mencakup pembangunan budaya kinerja, manajemen Sumber Daya Manusia, proses bisnis yang efektif dan efisien, pengawasan dan pengendalian internal, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Tidak hanya sekedar membangun sistem, unit kerja percontohan juga harus berorientasi pada peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan indeks persepsi korupsi dan indeks persepsi pelayanan publik yang harus memenuhi standar tinggi. Sehingga, survei atas pelayanan dan persepsi korupsi menjadi hal yang penting dan utama dalam membangun WBK/WBBM.

Pembangunan ini menunjukan adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Instansi dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas, sehingga program reformasi birokrasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Meskipun kita telah mengalami kemajuan, namun tantangan kita kedepan semakin besar. Persaingan global semakin ketat, luasnya wilayah Indonesia, dan banyaknya jenis layanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Disamping itu, tuntutan masyarakat semakin tinggi. Kita sebagai pemerintah harus mampu menjawab tuntutan-tuntutan tersebut.

Melalui pertemuan pada hari ini saya berharap peserta rapat dapat menggali lebih dalam cara survei dalam membangun WBK/WBBM, sehingga dapat diketahui pelayanan terbaik yang diinginkan/diharapkan oleh masyarakat, khususnya pelayanan yang akan diberikan oleh Polres, Polresta, Ditlantas, dan Ditreskrimsus. Karena POLRI itu berbeda, POLRI merupakan ikon tersendiri yang harus mampu dan wajib membuktikan kepada masyarakat "Rastra Sewakottama" nya, yang berarti Polri adalah abdi utama daripada Nusa dan Bangsa.

Hadirin peserta rapat sekalian,

Kepada unit kerja pelayanan yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM, agar dapat menularkan ilmunya, membagikan pengalamannya kepada seluruh peserta rapat teknis hari ini. Saya juga berharap agar setiap pimpinan unit kerja pelayanan dapat memperkuat komitmennya dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM, memperbanyak kegiatan-kegiatan yang menjalin hubungan dengan masyarakat, sehingga secara sistematis dapat memberikan layanan yang berkualitas dan bersih dari KKN.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Akhir kata, saya mengucapkan selamat bertugas dan berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam pengabdian kita kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Wabillaahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.



SAMBUTAN PADA ACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA DI BIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI DAN PERPUSTAKAAN JAKARTA, 25 JULI 2018

Yang saya hormati:

- Kepala Perpustakaan Nasional;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Perpustakaan Nasional;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian PANRB; serta
- Hadirin yang berbahagia.

Assalaamua'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan acara yang bersejarah ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional dan seluruh jajaran atas kerja sama yang erat sehingga acara penandatangan nota kesepahaman dapat kita selenggarakan pada hari ini.

Hadirin yang saya hormati,

Pada saat memasuki Gedung Perpustakaan Nasional yang megah dengan segala fasilitas terkini yang dimiliki, saya meyakini bahwa perpustakaan bukanlah "business as usual" dan pesatnya teknologi informasi di bidang perpustakaan tidak bisa dibendung. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu menyesuaikan diri dengan terus mengembangkan prinsip entrepreneurship dan hospitality. Perkembangan teknologi informasi dapat dilihat dari adanya pergeseran layanan perpustakaan dari manual ke elektronik (e-library).

Tantangan baru teknologi informasi khususnya untuk para penyedia informasi adalah bagaimana menyalurkan informasi dengan cepat, tepat, dan global. Perpustakaan sebagai salah satu penyedia informasi yang keberadaannya sangat penting di dunia informasi, mau tidak mau harus memikirkan kembali bentuk yang tepat dalam menjawab tantangan ini.

Di era digital ini, tantangan pengelolaan perpustakaan semakin besar. Perpustakaan kini tidak bisa lagi bangga dengan tumpukan koleksi buku di raknya. Pencarian informasi dari para pengguna informasi mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah berkomitmen untuk mewujudkan visi 2020 menjadikan perpustakaan Kementerian PANRB sebagai "The Best Thematic Digital Library" dengan melakukan transformasi digital baik dalam business process, digitalisasi koleksi sampai pada merubahan mindset SDM pengelolanya.

Terkait perpustakaan tematik ini sengaja kami ketengahkan dengan pertimbangan agar perpustakaan Kementerian PANRB ke depan menjadi sumber utama referensi di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PANRB juga berkomitmen memperkuat bahan pustaka yang bersumber dari konten lokal (*local content*). Pada Instansi Publik seperti Kementerian PANRB, *local content* pada umumnya berupa Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Majalah, Hasil Kajian, serta berbagai macam arsip yang dapat dipublikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut tentu tidak mudah, membutuhkan komitmen kuat dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya tersebut.

Hadirin yang saya hormati,

Pada hari ini Kementerian PANRB dan Perpustakaan Nasional telah menandatangi kesepakatan bersama yang meliputi berbagai bidang kerja sama antara lain terkait Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan *repository digital, Indonesia One Search* (IOS), serta pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan.

Kita juga bertekad akan menjalin kerja sama untuk mengadakan pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan; penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR); serta perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional.

Tak hanya di lingkup kepustakaan, kita juga akan memperkuat kerja sama di bidang pengembangan reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, serta pelayanan publik.

Saya meyakini bahwa kerja sama ini akan memperkuat sinergi antara Kementerian PANRB dengan Perpustakaan Nasional dalam mendorong terwujudnya perpustakaan "zaman now" yang mampu melayani sesuai tuntutan dan kebutuhan saat ini. Di bidang pendayagunaan aparatur, saya mengharapkan dengan kerja sama ini pustakawan Kementerian PANRB akan makin profesional, memiliki kemampuan yang mumpuni didalam ilmu perpustakaan, dan melek teknologi.

Muara dari upaya kerja sama ini adalah terwujudnya perpustakaan Kementerian PANRB sebagai perpustakaan tematik terbaik di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menjadi rujukan unggulan kepustakaan di bidang tersebut.

Visi ini kami akan capai dengan berbagai upaya, karena kami meyakini bahwa perpustakaan adalah sumber ilmu pengetahuan bahkan inspirasi. Bahan perenungan untuk kita semuanya yang berkiprah di lapangan pemerintahan, karena tidak mungkin kita mampu merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pemerintahan dengan baik tanpa topangan pengetahuan dan wawasan yang luas. Perpustakaan adalah sumber bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta wawasan.

Hadirin yang saya banggakan,

Dengan penandatangan nota kesepakatan ini saya mengharapkan kerja sama yang telah tertuang dapat segera diimplementasikan dengan rencana kerja konkret yang dapat kita lakukan bersama. Kami meyakini nota kesepahaman akan menjadi landasan kerja sama yang erat di masa-masa berikutnya baik di bidang perpustakaan maupun di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi antara Perpustakaan Nasional dan Kementerian PANRB.

Untuk itu sekali lagi menyampaikan penghargaan kepada Perpustakaan Nasional atas telah terselenggarannya penandatanganan nota kesepahaman pada hari ini. Semoga Allah SWT meridoi upaya kita bersama.

Wabillaahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.











AGUSTUS 2018

SAMBUTAN PADA ACARA PEMBANGUNAN UNIT KERJA PERCONTOHAN NASIONAL ZONA INTEGRITAS DAN PENANDATANGANAN MOU TENTANG INTEGRASI DAN PERCEPATAN PENANGANAN PERKARA OLEH KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI, POLRES, DAN LAPAS SITUBONDO SITUBONDO, 6 AGUSTUS 2018

Yang saya hormati:

- Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Asrena Polri;
- Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN;
- Bupati Situbondo;
- Pejabat Eselon I Kementerian PANRB; serta
- Hadirin sekalian yang berbahagia.

Bismillaahirrohamaanirrohiim

Assalaamua'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nya kita dapat bertemu dan berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama memperbaiki kondisi bangsa, melalui upaya perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Hari ini baru saja kita saksikan sebuah torehan sejarah baru dalam perjuangan memperbaiki supremasi hukum negeri ini, melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengintegrasian dan Percepatan Penanganan Perkara oleh Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kepolisian Resor, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Situbondo. Peristiwa ini merupakan yang pertama dalam perjalanan penegakan hukum Republik Indonesia. Oleh karenanya, kita patut bangga dapat menjadi saksi hidup dalam peristiwa ini.

Peristiwa ini juga membuktikan bahwa komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan tetap berjalan secara konsisten di tengah situasi sosial-politik yang terus berkembang. Kita sebagai bagian dari birokrasi telah menunjukkan, bahwa sebagai mesin pemerintahan, gejolak ekonomi, politik, sosial, dan budaya tidak mempengaruhi kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Sebaliknya, kualitas pelayanan publik semakin baik, bersih, akuntabel, dan profesional.

Saya pribadi sangat bangga dan mengapresiasi langkah besar ini. Kita semua tahu, tidak mudah untuk mendudukkan bersama keempat lembaga penegakkan hukum ini. Keempatnya mengawal peran yang besar dan signifikan dalam penegakan hukum dan penanganan perkara. Seringkali karena satu dan lain hal, penegakan hukum dan penanganan perkara terfragmentasi, sendiri-sendiri, tidak menyatu, yang mengakibatkan prosesnya menjadi kurang efektif dan efisien. Namun melalui peristiwa ini, saya yakin, akan tercipta kesamaan gerak langkah penanganan perkara menjadi lebih lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik dan selaras dari hulu ke sampai ke hilirnya.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Butuh komitmen dan kemauan yang besar untuk merealisasikan peristiwa hari ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Wakil Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Bapak Asrena Polri beserta Kapolres Situbondo, Bapak Sekjen Mahkamah Agung beserta Kepala Pengadilan Negeri Situbondo, dan Sekjen Kemenkumham beserta Kepala Lapas Situbondo atas komitmen, dedikasi, inisiatif, dan inovasinya dalam mengawal terciptanya penegakan hukum dan penanganan perkara yang semakin baik, khususnya di Lingkungan Kabupaten Situbondo.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini saya juga ingin Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Situbondo menjadi *prototype* atau *role model* bagi seluruh kantor-kantor dan unit-unit lainnya di seluruh Indonesia melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi bersih Melayani. Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) meminta unit-unit kerja pelayanan membangun budaya integritas dan melayani secara konsisten. Diawali dari mulai pucuk pimpinan tertinggi sampai dengan para pegawai pelaksana.

Tahun 2017, Polri telah berhasil menciptakan 12 unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK, dan 3 unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBBM. Tahun ini, usulan yang masuk ke Kementerian PANRB adalah sebanyak 116 unit kerja, dan kami perkirakan terdapat sekitar 50 unit kerja yang berpotensi ditetapkan sebagai WBK.

Tidak ketinggalan, Kejaksaan Agung juga telah mengusulkan 16 unit kerja, Mahkamah Agung 20 unit kerja, dan Kementerian Hukum dan HAM 13 unit kerja yang akan kami survey dan evaluasi. Saya sangat berharap diantara unit-unit kerja yang diusulkan tersebut, terdapat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBK/WBBM. Besar harapan saya, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor, Pengadilan Negeri, dan Lapas Situbondo termasuk diantara yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM itu.

Oleh karenanya, saya intruksikan segera kepada Kementerian PANRB, secara khusus kepada Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan serta Deputi Bidang Pelayanan Publik untuk membuat tim kecil bersama dengan kejaksaan, kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, dan Mahkamah Agung. Tim kecil ini saya harapkan nantinya dapat menyusun aplikasi *prototype* dan panduan bersama yang akan kita bagikan kepada seluruh aparat penegakan hukum di Indonesia. Melalui

langkah tersebut saya optimis perbaikan sistem penegakan hukum semakin baik, tidak hanya di Kabupaten Situbondo, tapi di seluruh wilayah Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengajak seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk terus melakukan upaya perbaikan guna mewujudkan Aparat Penegak Hukum yang lebih profesional, bersih, dan melayani.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam pengabdian kita kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Wabillaahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.







SAMBUTAN PADA ACARA WORKSHOP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNGAN BPK RI JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018

Yang terhormat:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan BPK RI; serta
- Hadirin sekalian yang berbahagia.

Bismillahirrohamanirrohim

Assalaamua'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas perkenan-Nya kita dapat bertemu dan berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama memperbaiki kondisi bangsa, melalui upaya perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, yang diindikasikan dengan aparatur negara yang lebih bersih, bebas KKN, kompeten, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, seluruh aspek terkait dengan penerapan reformasi birokrasi harus kita bangun. Baik aspek budaya dan cara kerja aparatur, kelembagaan, pengawasan, tata laksana, etika pelayanan, dan lain sebagainya. Tanpa reformasi birokrasi yang menyentuh pada ke seluruh aspek tersebut, niscaya pelayanan publik yang baik akan sangat sulit terwujud, investasi terhambat, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga akan terkendala.

Para hadirin yang berbahagia,

Dalam rangka mereviu kapasitas organisasi, Kapolri pada tanggal 9 Maret 2018 yang lalu telah mengajukan usulan kepada kami untuk peningkatan tipologi Polda Jambi bersama-sama dengan Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk ditingkatkan menjadi Tipe A Bintang Dua.

Peningkatan tipologi itu diusulkan dengan pertimbangan adanya peningkatan beban kerja, penguatan kapasitas organisasi, peningkatan dukungan sumber daya dan personel. Kami pada prinsipnya dapat memahami urgensi tersebut namun sebagai

kementerian yang berwenang di bidang kelembagaan kami tentu berkewajiban untuk mengecek, menguji, dan mengevaluasi sejauh mana urgensi tersebut dapat dipertimbangkan.

Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan,

Berbagai kebijakan terkait percepatan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik telah kami luncurkan. Sebagian besarnya terbukti memberikan hasil yang baik. Efisiensi penggunaan anggaran hotel, penghematan biaya perjalanan dinas, dan penghematan sarana kerja, adalah diantara kebijakan yang telah menghasilkan penghematan yang signifikan terhadap penggunaan anggaran negara.

Dalam rangka penguatan integritas aparatur serta sebagai upaya pencegahan korupsi, secara khusus kami telah menggulirkan program pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja sebagai suatu percontohan. Dengan menerapkan model percontohan tersebut, maka diharapkan penerapan berbagai aspek reformasi birokrasi akan lebih terfokus, sehingga wilayah-wilayah yang ditetapkan tersebut akan membentuk suatu *island of integrity* sebagai percontohan unit kerja lainnya agar lebih cepat menerapkan reformasi birokrasi.

Pada tahun 2018 ini, jumlah unit kerja pelayanan percontohan yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi WBK/WBBM semakin banyak. Sampai dengan saat ini, kami telah menerima usulan sebanyak 910 unit kerja pelayanan dari 113 Instansi Pemerintah, meningkat 65,84% dari tahun sebelumnya yang diusulkan dari 48 Instansi Pemerintah. Dari 910 unit kerja pelayanan yang diusulkan, sebanyak 9 unit kerja merupakan unit kerja yang diusulkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Hadirin yang terhormat,

Saya sangat menghargai upaya Bapak Ketua BPK dan seluruh jajaran yang telah memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, lebih bersih, serta mampu memberikan hasil yang terbaik bagi negara.

Sampai dengan saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah memiliki 8 Unit berpredikat WBK dan 1 Unit berpredikat WBBM. Langkah selanjutnya bagi BPK adalah mempercepat pembangunan di unit kerja lainnya dengan berbekal pengalaman dari unit kerja yang telah berhasil.

Workshop pada hari ini diharapkan dapat menjadi bekal persiapan evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga diperoleh tips dan trik yang dapat dilakukan untuk bisa memperoleh predikat tersebut.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Melalui workshop pada hari ini juga, diharapkan unit kerja yang sebelumnya telah memperoleh predikat WBK/WBBM dapat berbagi pengalaman, terutama dalam meningkatkan hasil survei. Sehingga nanti diharapkan unit kerja pelayanan yang diusulkan oleh BPK RI dapat memperoleh predikat WBK/WBBM.

Hadirin yang terhormat,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengajak seluruh jajaran BPK RI untuk terus melakukan upaya perbaikan guna mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, bersih, dan melayani.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam pengabdian kita kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Terima kasih.

Wabillaahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.





POINTERS SAMBUTAN PADA UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-73 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 17 AGUSTUS 2018

Yang saya hormati:

- Sekretaris Kementerian PANRB;
- Bapak/Ibu Deputi dan Staf Ahli;
- Bapak/Ibu Pimpinan Tinggi Pratama; serta
- Seluruh staf Kementerian PANRB yang saya cintai dan banggakan.

Bismillahirrohamanirrohim Assalaamua'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua Merdeka!

- Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT karena pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama memperingati Hari Ulang Tahun Ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam suasana penuh kedamaian, ketentraman, dan semangat
- Hari ini merupakan hari penuh yang keberkahan karena 73 tahun lalu bangsa kita dengan heroisme dan tekad bulat berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan menyatakan kepada dunia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
- Sebuah tekad yang dapat diwujudkan karena adanya keberanian untuk membangun persatuan dan kesatuan dengan menyingkirkan semua perbedaan dan merangkul keragaman. Keragaman kita bukanlah beban. Keragaman kita adalah modal sosial yang abadi untuk merekatkan tali persaudaraan dalam rumah kebangsaan indonesia.

Para hadirin yang saya hormati,

- Dalam usia ke-73 tahun, bangsa kita telah mengalami berbagai ujian dalam berbagai bidang, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Namun sejarah membuktikan bahwa bangsa kita mampu bertahan dan tegak berdiri.
 - → Kemampuan untuk tetap kokoh tidak lain karena bangsa kita **mempunyai** Pancasila sebagai landasan hidup bersama yang menyatukan semua elemen bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan adat istiadat.

- → Sifat dasar bangsa Indonesia yang menonjolkan toleransi, gotong-royong dan paguyuban, serta kerukunan mampu memperkuat rajutan persatuan bangsa di tengah gempuran dan cobaan yang menggerogoti integritas NKRI.
- Namun demikian harus kita akui sampai saat ini masih ada upaya-upaya untuk mengganggu rasa persatuan dan kesatuan kita baik melalui paham-paham intoleransi maupun ekspresi kebencian yang didasarkan oleh primoridalisme dan indentitas sempit.
- Teknologi informasi yang sejatinya harus membantu komunikasi antarmanusia laksana pedang bermata dua yang juga mempunyai dampak negatif dalam menyebarkan rasa permusuhan. Saya yakin bahwa seluruh staf Kementerian PANRB mempunyai rasa tanggungjawab dalam menggunakan teknologi tersebut dan tidak terseret arus dalam menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Mari kita sebarluaskan berita positif hasil kiprah semua anak bangsa. Hal ini penting untuk menumbuhkan optimisme dan melangkah kedepan menjadi bangsa maju sejajar dengan negara-negara maju lainnya.
 - → Kita bangga prestasi kita di **bidang olah raga semakin menonjol**. Kemenangan timnas U-16 di AFF 2018, medali emas yang diperoleh oleh Lalu Mohammad Zohri dalam kejuaraan dunia IAAF lari 100 meter, dan prestasi lainnya.
 - → Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah saat ini telah secara masif dilakukan. Pembangunan jalan tol secara merata di seluruh wilayah Indonesia sampai lebih dari 500 kilometer. Belum lagi pembangunan bandara, pelabuhan, bendungan, dan masih banyak lagi.
 - → Angka kemiskinan menurun secara signifikan, yaitu sebesar 9,82% pada maret tahun ini. Untuk pertama kalinya angka kemiskinan berada dalam angka satu digit dan menjadi yang paling rendah sepanjang sejarah.
 - → Lompatan juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017, sehingga Indonesia masuk dalam kategori High Human Development Index.
 - → Masyarakat internasional juga mengapresiasi kemudahan berusaha kita dengan meningkatnya Indeks Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) dari 120 pada tahun 2014 menjadi 72 pada tahun 2017.
 - → Di bidang politik, kita juga semakin matang dan dewasa. Pada tahun lalu pilkada serentak dilakukan di 101 daerah dan tahun ini telah dilakukan di 171 daerah, yang semuanya berlangsung secara aman dan damai.
 - → Pentas kita di medan diplomasi juga semakin diakui dengan masuknya Indonesia ke klub elit dunia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB tahun 2019-2020. Hal ini merupakan kesempatan kita untuk berkontribusi secara positif pada penciptaan perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi kita.
 - → Inilah "Kerja Kita, Prestasi Bangsa", yang akan memperkuat rasa bangga dan keyakinan kita pada Indonesia.

Para peserta upacara yang saya hormati,

- Kita semua di Kementerian PANRB dari level pimpinan sampai staf tentu dapat turut berkiprah dan menoreh prestasi. Saya ikut bangga bahwa capaian kinerja kementerian kita telah diapresiasi oleh banyak pihak, baik di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas, pengawasan, penataan kelembagaan dan tata laksana, manajemen SDM aparatur hingga pelayanan publik. Tetapi saya minta itu semua tidak melenakan kita. Kita harus terus berprestasi.
- Tantangan di depan akan semakin berat. Persaingan global yang sengit harus dihadapi dengan birokrasi yang smart, lincah, dan adaptif. Negara kita adalah negara besar yang harus dikelola dengan baik dengan semua potensi yang ada. Izinkan saya mengutip pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa pada pentas persaingan global saat ini bukan yang besar akan mengalahkan yang kecil tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat.
- Untuk itu saya berharap Kementerian PANRB dapat terus memainkan peran strategisnya dalam me-reformasi birokrasi Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan yang menuju birokrasi berkelas dunia.

Para hadirin yang saya hormati,

- Dalam peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita terus bekerja untuk membangun aparatur negara dan mereformasi birokrasi serta menorehkan prestasi-prestasi yang membanggakan untuk memperkuat rasa bangga dan keyakinan kita pada indonesia.
- Mari terus bekerja. Bekerja keras, cerdas dan ikhlas. Bekerja untuk negara yang disertai keyakinan bahwa kemajuan akan kita raih bersama sampai generasi selanjutnya. Saya yakin dan optimis bahwa kita pasti bisa.

Dirgahayu Republik Indonesia MERDEKA!

Sekian dan Terima Kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Drs. Syafruddin, M.Si.









POINTERS SAMBUTAN PADA ACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMEN PANRB) DENGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN) SENIN, 20 AGUSTUS 2018

Yang saya hormati:

- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Mayor Jenderal TNI Dr. Djoko Setiadi, M.Si.;
- Sekretaris Utama dan para Deputi Badan Siber dan Sandi Negara;
- Para pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
- Para tamu undangan; serta
- Hadirin yang berbahagia.

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Para hadirin yang saya hormati,

- Salah satu misi dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan misi tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki tiga sasaran yaitu menciptakan birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.
 - → Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, perlu adanya dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik dalam berinteraksi antar instansi pemerintah maupun dengan pihak eksternal.
 - → Di dalam reformasi birokrasi, peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat penting untuk mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan birokrasi pemerintahan.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan

memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dalam penerapan SPBE, peran BSSN sangat diperlukan khususnya dalam keamanan informasi. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) perlu bekerjasama dengan BSSN yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman pelaksanaan reformasi birokrasi dan keamanan informasi.

- → Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka meningkatkan sinergitas kinerja para pihak untuk kepentingan nasional serta mendukung upaya percepatan pembangunan nasional.
- → Nota kesepahaman ini juga bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kerja sama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dengan ruang lingkup yang disepakati mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan siber dan persandian, serta program reformasi birokrasi lainnya.

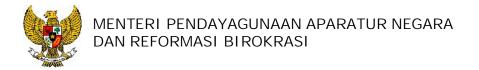
Hadirin yang saya hormati,

- Kerja sama ini utamanya diprioritaskan pada memberikan dukungan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan keamanan informasi dalam penyusunan kebijakan SPBE. Selain itu, kerja sama ini diperlukan untuk membuat sistem keamanan siber pada penerapan SPBE secara nasional, serta memfasilitasi kebutuhan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
- Kerjasama ini diharapkan dapat melindungi aset informasi dan TIK secara nasional sebagai bentuk ketahanan keamanan SPBE serta meningkatkan kinerja birokrasi kedua belah pihak yang didukung dengan penyelenggaraan SPBE. Efek jangka panjangnya, kerja sama ini nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik yang aman dan andal.

Para hadirin yang saya hormati,

Menutup sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas terciptanya kerjasama ini yang tidak lain adalah dalam rangka memajukan bangsa ini. Semoga Allah SWT meridai segala upaya kita untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi.

Sekian dan Terima Kasih,



Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Drs. Syafruddin, M.Si.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI





POINTERS SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN HARI RAYA IDUL ADHA 1439 H JAKARTA, 23 AGUSTUS 2018

Yang saya hormati:

- Sekretaris Kementerian PANRB;
- Bapak dan Ibu Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus;
- Bapak dan Ibu Pimpinan Tinggi Pratama; serta
- Seluruh staf Kementerian PANRB yang saya banggakan.

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil 'alamin, wabihi nasta'in 'ala umuriddunya waddin

Ashsholatu wassalamu'ala asrofil ambiyaa iwal mursalin wa'ala alihi washohbihi ajma'in.

Robbisrohli sodri, wayassrili amri, wahlul uqdatammilisani yafqohu qouli, amma ba'du.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala (SWT) karena pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama menyelenggarakan pemotongan hewan kurban.
- Pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah kemarin, kaum muslimin merayakan hari Idul Adha dengan melaksanakan shalat Id dan setelah itu menyembelih hewan kurban sebagai sunnah muakkadah.
- Perayaan Idul Adha tidak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim 'alaihis salam (as) dan Nabi Ismail 'alaihis salam (as). Bapak anak ini menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam ketaatan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala (SWT), kesabaran dan keikhlasan beribadah, serta dalam menjalani kehidupan.
- Hikmah Idul Adha dan pemotongan hewan qurban adalah bahwa Allah Subhanahu Wata'ala (SWT) menghendaki keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wata'ala (SWT), serta semangat berbagi untuk sesama.

Bapak ibu yang saya hormati,

- Saya berharap nilai-nilai idul kurban dapat menginspirasi dan memacu kita untuk berbakti dan berkarya lebih baik di Kementerian PANRB.
- Keikhlasan dan kesediaan berkurban merupakan nilai penting untuk diinternalisasi dan diimplementasikan dalam meningkatkan kinerja Kementerian PANRB secera keseluruhan.
- Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita sehingga pada Hari Raya Idul Adha ini kita dapat melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala (SWT) meridhoi dan menerima amal ibadah kita.

Sekian dan Terima Kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Drs. Syafruddin, M.Si.







POINTERS SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS TAHUN 2018 JAKARTA, 30 AGUSTUS 2018

Yang Terhormat:

- Para Sekjen/Sesmen/Sestama Kementerian dan Lembaga;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PANRB; serta
- Para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia.

Assalamualaikum. Wr. Wb. Salam Sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi pada acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan CPNS Tahun 2018.

Bapak, ibu, hadirin yang saya hormati,

- Saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan cepat di era industri
 4.0 yang dicirikan dengan peran mesin dan otomatisasi yang semakin dominan serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.
 - → Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan tersebut, kita harus mempersiapkan dengan baik sdm aparatur dalam menyambut era industri 4.0. Adapun asn yang diperlukan ke depan adalah asn yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tentunya tetap harus memiliki rasa nasionalisme yang semakin mantap dan berintegritas tinggi.
- Saat ini, jumlah aparatur sipil negara nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana / administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 38%. Proporsi tenaga administratif yang dominan tersebut dapat menjadi beban dalam menghadapi tantangan ke depan. Menyikapi hal tersebut, kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran Nawacita.

Untuk mengatasi problem mismatch dan indisipliner, serta menghadapi persaingan global dan meningkatnya tuntutan publik, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan untuk menghasilkan SDM yang lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024.

Bapak dan ibu yang saya banggakan,

- Fokus perbaikan manajemen ASN untuk menyongsong era industri 4.0 meliputi:
 - 1) **Perencanaan ASN**. Perencanaan ASN seluruh kementerian/lembaga/pemda harus didasarkan pada arah pembangunan nasional dan potensi daerah dengan mempertimbangkan **analisis jabatan dan analisis beban kerja**;
 - 2) Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi CPNS menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan hasil *real-time*, serta seleksi terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi;
 - 3) Pengembangan kompetensi. Melaksanakan kebijakan diklat 20 jam pelajaran per tahun untuk masing-masing ASN dan perbaikan metode pengembangan kompetensi;
 - 4) **Penilaian kinerja dan penghargaan**. Penilaian kinerja **dilakukan secara 360 derajat** sebagai dasar pemberian remunerasi dan penghargaan;
 - 5) **Promosi, rotasi, dan karir**. Didesain berbasis sistem merit dengan memperhatikan kebutuhan nasional **berdasarkan talent pool**;
 - 6) **Purnabakti**. Perbaikan **sistem pensiun** dengan iuran bersama antara ASN dan pemerintah, rasio manfaat yang layak, dan didanai secara penuh *(fully funded)* oleh lembaga pengelola pensiun, perbaikan jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya, serta pengelolaan dana untuk kesejahteraan ASN dalam bentuk penyediaan hunian dan retail.

Bapak, ibu serta hadirin sekalian,

- Dalam hal perencanaan ASN, pemerintah masih tetap memprioritaskan tenaga pendidikan dan kesehatan, serta tenaga-tenaga untuk mendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, dan ketahanan pangan sesuai dengan program pembangunan dalam kabinet kerja.
- Dalam kebijakan pengadaan PNS tahun 2018, perencanaan dan rekrutmen PNS juga diutamakan untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dengan prioritas pada bidang pelayanan dasar, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk itu, proporsi terbesar formasi CPNS akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, yang saat ini masih kurang dan sangat dibutuhkan untuk memperkuat daya saing bangsa.
- Setelah fase perencanaan diselesaikan, maka hal penting lainnya adalah fase rekrutmen dan seleksi yang mulai dilaksanakan bulan Oktober 2018. Saya

berpesan bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS nanti, harus berdasarkan 6 (enam) prinsip sebagai berikut:

- 1) **Kompetitif**, artinya semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada **passing grade** yang akan ditetapkan;
- 2) **Adil**, artinya proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau tidak ada pilih kasih;
- 3) **Objektif**, artinya dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil tes sesuai keadaan yang sesungguhnya;
- 4) **Transparan**, artinya proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengolahan hasil tes serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
- 5) Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), artinya seluruh proses seleksi CPNS harus bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta
- 6) **Tidak dipungut biaya,** artinya pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi CPNS mulai dari pengumuman sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.

Bapak dan ibu yang saya hormati,

Mengakhiri sambutan ini, saya sampaikan bahwa kinerja ASN sangat berperan dalam mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat, seiring dengan peluang bonus demografi dan tren peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin melalui peningkatan kualitas SDM aparatur sedini mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan.

Terima Kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Drs. Syafruddin, M.Si.

